



Jokowi Cacat Moral, Konstitusi dan Demokrasi

Medan, MIMBAR - Pemecatan Joko Widodo (Jokowi) dari PDIP menjadi peristiwa bersejarah dalam politik Indonesia yang terus disorot publik.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai pemecatan ini menjadi evaluasi moral dan etik sempurna yang dilakukan PDIP terhadap kader yang cacat secara etika politik.

"PDIP telah membuat filter berlapis, tetapi pada akhirnya Jokowi dinyatakan cacat konstitusi, cacat demokrasi, cacat moral, bahkan cacat psikologi," tegas Rocky dikutip dalam akun Youtube pribadinya, Rabu (18/12/2024).



■ Bersambung ke Hal 11

Ia menyimpulkan, pemecatan Jokowi adalah langkah tegas dan eksistensial dari PDIP. Partai ini mungkin salah memilih Jokowi, tapi benar dalam mengambil keputusan untuk memecatnya.

LUAR NEGERI



Zionis Gempur Terus Gaza

12 WARGA PALESTINA TEWAS

Gaza, MIMBAR - Rentetan serangan udara Israel kembali menghantam wilayah Jalur Gaza, dengan salah satu serangan menghantam rumah yang menampung para pengungsi Palestina. Total sedikitnya 12 orang tewas akibat rentetan gempuran militer Israel tersebut.

■ Bersambung ke Hal 11

Jadwal Salat

17 JUMADIL AKHIR 1446 H

Subuh : 05:03 WIB	Maghrib : 18:22 WIB
Zuhur : 12:25 WIB	Isha : 19:37 WIB
Ashar : 15:48 WIB	■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah

Salah Memilih Kader

Oleh Dr A Rasyid, MA (Dosen FIS UINSU)



PEMECATAN seorang mantan presiden juga kader utama partai adalah langkah yang jarang terjadi. Alasan pemecatan menurut PDIP bahwa Jokowi melakukan tindakan merugikan partai, termasuk dugaan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) dan pelanggaran kode etik partai. Jika benar, ini menimbulkan implikasi serius terhadap citra Jokowi dan PDIP di mata publik.

Keputusan ini kemungkinan memecah opini publik. Sebagian mungkin mendukung langkah PDIP jika dianggap membela prinsip partai, sementara yang lain

■ Bersambung ke Hal 11



MAHASISWA DESAK KPK TANGKAP HARUN MASIKU :

Para mahasiswa mendesak KPK segera menangkap tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Harun Masiku. Mereka menilai jika Harun Masiku berhasil ditangkap, maka hal itu dapat mengembalikan marwah pemberantasan korupsi di Indonesia. (Foto Liputan6.com)

USAI DI OBRAK-ABRIK KPK

Gubernur BI Buka Suara

Jakarta, MIMBAR - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo buka suara soal dugaan kasus korupsi pemanfaatan dana CSR yang menimpa instansinya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mulai melakukan penyidikan pada kasus ini, bahkan sudah melakukan pengecekan di Kantor Pusat BI yang

ada di Bilangan Thamrin, Jakarta Pusat.

Pernyataan soal kasus ini disampaikan Perry saat menjawab pertanyaan wartawan dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur BI, di Kompleks BI, Jakarta Pusat, Rabu (18/12).

Perry mengungkapkan tiga hal soal dugaan kasus korupsi ini. Berikut ini rinciannya:

1. Kantor BI Digeledah, KPK Bawa Dokumen

Perry membenarkan KPK melakukan pengecekan di kantornya pada Senin, 16 Desember 2024 malam. Kedatangan KPK dilakukan dalam rangka melengkapi proses penyidikan dugaan korupsi CSR BI.

Dia mengatakan usai pengecekan itu, KPK membawa

■ Bersambung ke Hal 11



Jalan Maut Medan-Berastagi Renggut 30 Korban Jiwa

Ratusan Warga Berastagi Demo Gedung DPRD Sumut

Medan, MIMBAR - Seratusan warga dari Persatuan Warga Berastagi dan Sekitarnya (PWBS) menggelar aksi unjukrasa di depan gedung DPRD Sumut, Rabu (17/12). Salah satu tuntutan mereka, mereka mendesak Pemprov Sumut melalui dinas terkait untuk segera menanggulangi jalan maut Medan-Berastagi yang sudah merenggut 30 korban tewas.

Dengan menggunakan belasan bus, peserta aksi yang berasal dari 9 kabupaten/kota termasuk dari Aceh, juga membawa replika jenazah sebagai simbol telah "matinya" kepedulian pemerintah terhadap keselamatan masyarakat, khususnya warga Tanah Karo, yang melintasi jalan tersebut.

Koordinator aksi, Julianus Paulus Sembiring dalam orasinya di atas bus mengatakan, jalan Medan-Berastagi yang panjangnya sekitar 70 kilometer telah menjadi jalan maut, pasca tanah longsor yang terjadi 27 November 2024 lalu.

"Ini sudah mau Natalan, dan Tahun Baru 2025, jangan kalian biarkan korban tewas bertambah, cukup 30 orang itu akibat long-



sor dan kecelakaan pada 27 Nopember lalu," ujar Paulus. Mereka juga mendesak para wakil rakyat Dapil Sumut 11

mencakup Tanah Karo, untuk keluar dari gedung dewan,

■ Bersambung ke Hal 7

Menkeu Diminta Kaji Ulang PPN 12% di Bidang Pendidikan



Jakarta, MIMBAR - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP Bonnie Triyana meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengkaji ulang penerapan Pajak Penambahan Nilai (PPN) 12 persen di bidang pendidikan.

■ Bersambung ke Hal 11



Soal Jatah Tambang Bekas Muhammadiyah: Belum Jelas

Jakarta, MIMBAR - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan pihaknya belum mendapat kejelasan terkait pemberian izin tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk dari pemerintah.

■ Bersambung ke Hal 11



- Kok baru sekarang ...
- Hehehe...

Muhammadiyah: Belum...

Dari Halaman 1

Haedar mengaku sampai hari ini belum menerima laporan dari tim internal maupun Kementerian ESDM terkait pemberian izin tambang tersebut.

“Jika itu memang dipertukarkan untuk Muhammadiyah itu nanti akan ada pertemuan, biasanya antar tim penelitian. Tim belum menyampaikan laporan kepada kami,” kata Haedar di kantor PP Muhammadiyah, Kota Yogyakarta, DIY, Rabu (18/12).

“Kami belum menerima laporan dari tim, biasanya tim akan melaporkan bila segala sesuatunya sudah jelas. Ada pertemuan juga antara tim dari Muhammadiyah dari tim kementerian,” sambungnya.

Terlepas dari itu, Haedar menggarisbawahi, aspek terpenting menyangkut isu pengelolaan tambang buat ormas keagamaan ini adalah bagaimana pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bisa berjalan proporsional.

Dalam artian pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan konstitusional atau sesuai regulasi.

Haedar menekankan izin pengelolaan tambang yang diterima Muhammadiyah akan dilakukan secara seksama, berorientasi pada kesejahteraan sosial dan menjaga kelestarian alam secara seimbang.

“Muhammadiyah selalu mengindahkan hukum undang-undang dan ketentuan yang berlaku,” ucap Haedar.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahilil Lahadalia menyebut Muhammadiyah kemungkinan besar akan mendapat jatah lokasi

tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk.

“Kalau saya tidak lupa, itu punya Adaro, kemungkinan besar,” kata Menteri Bahilil ditemui di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (14/12) dikutip Antara.

Bahilil mengatakan perizinan untuk Muhammadiyah bisa mengelola tambang tersebut saat ini sudah berproses dan tinggal menunggu waktu izin dikeluarkan.

Lebih lanjut, ia mengatakan untuk organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) sudah terlebih dahulu mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk mengelola bekas PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC).

“Sudah jalan, sudah selesai, IUP sudah keluar,” ujarnya.

Pemerintah menyediakan enam lahan tambang batu bara untuk dikelola ormas keagamaan. Keenamnya adalah tambang bekas PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.

Saat ini, baru eks lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang ditetapkan untuk dikelola oleh PBNU.

Pemberian izin khusus bagi ormas untuk mengelola lahan tambang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. **(cnni/js)**



Salah Memilih...

Dari Halaman 1

mungkin mempertanyakan independensi partai atau motif politik di balik keputusan tersebut.

Rocky Gerung menyebut Jokowi “cacat moral, konstitusi, demokrasi, bahkan psikologi. Rocky menggunakan istilah yang berat dan mungkin lebih bersifat opini daripada fakta. Meski begitu, kritik seperti ini wajar dalam demokrasi, terutama jika didasarkan pada argumen rasional dan bukti.

Jika kritik ini benar, maka hal tersebut menjadi refleksi terhadap kepemimpinan Jokowi selama ini. Namun, jika tidak terbukti, ini hanya menjadi narasi yang memanaskan suasana politik.

Dugaan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi adalah tuduhan serius yang berpotensi mencederai sistem demokrasi. Jika benar terjadi, ini merusak prinsip rule of law dan independensi lembaga negara. Namun, Jokowi sendiri telah membantah tuduhan tersebut pada tahun 2023. Validitas tuduhan ini perlu diuji dengan bukti konkret.

Pemecatan Jokowi tersebut menciptakan preseden unik dalam politik partai di Indonesia. Langkah tegas PDIP dapat dipandang sebagai bentuk penegakan disiplin, tetapi juga bisa dianggap sebagai pengakuan atas kesalahan dalam memilih kader sebelumnya.

PDIP perlu meyakinkan pemilih bahwa keputusan ini adalah demi kepentingan rakyat, bukan hanya konflik internal partai. Langkah ini berpotensi memengaruhi stabilitas politik di Indonesia.

Pemecatan ini juga bisa melemahkan pengaruh politik Jokowi di akhir masa jabatannya. Dengan pemecatan Gibran dan Bobby, langkah ini mungkin mengubah konstelasi politik menjelang Pemilu 2024.

Dalam teori komunikasi

politik, persoalan seperti pemecatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh PDIP dan narasi yang menyertainya dapat dianalisis melalui beberapa perspektif berikut:

Berdasarkan perspektif political branding bahwa dalam komunikasi politik, citra atau merek politik sangat penting. Kasus ini dapat dianalisis bahwa PDIP tampaknya ingin memperkuat branding sebagai partai yang teguh pada prinsip, meskipun harus mengambil langkah drastis terhadap kader yang dianggap mencederai nama baik partai. Ini menunjukkan upaya untuk menjaga kredibilitas di mata pemilih.

Pemecatan ini berpotensi merusak citra politik Jokowi, yang sebelumnya dikenal sebagai pemimpin rakyat. Isu seperti intervensi MK dapat memperkuat narasi negatif jika tidak direspons secara strategis.

Dari perspektif agenda setting, bagaimana media, partai politik, dan aktor-aktor politik lain dapat memengaruhi isu yang dianggap penting oleh publik. Dalam kasus ini, narasi seperti “cacat moral, konstitusi, dan demokrasi” yang dilontarkan Rocky Gerung memiliki potensi untuk menjadi isu utama dalam opini publik. Media yang mendukung atau menentang pemerintah akan memainkan peran besar dalam membingkai isu ini.

PDIP mungkin mencoba mengontrol agenda publik dengan mengalihkan perhatian dari kelemahan internal partai ke langkah tegas yang mereka ambil terhadap Jokowi.

Komunikasi politik tidak hanya tentang penyampaian pesan, tetapi juga tentang strategi menghadapi krisis.

Dengan pemecatan ini, PDIP mungkin mencoba merespons ketidakpuasan internal maupun eksternal. Langkah ini adalah bentuk damage control untuk memisahkan partai dari kebijakan atau tindakan Jokowi yang dianggap kontroversial. ***

Dari Halaman 1

Layanan sekolah internasional direncanakan bakal dikenakan PPN 12 persen mulai Januari 2025. “Saya minta Menteri Keuangan mengkaji ulang penerapan PPN 12 persen untuk bidang pendidikan,” kata Bonnie saat dihubungi, Rabu (18/12).

Menurutnya, orang tua yang mengirim anak mereka ke sekolah internasional harus dianalisis latar belakang kelasnya, apakah termasuk kelas menengah atau kelas atas.

Bonnie mengatakan banyak warga kelas menengah yang memaksakan diri menyekolahkan anak mereka ke sekolah standar internasional bukan karena kaya, tapi karena ingin pendidikan yang berkualitas untuk anak mereka. Hal itu juga terkait dengan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia yang tidak merata.

“Kalau untuk menyekolahkan anak supaya dapat pendidikan bermutu saja masih dipajakin, bagaimana lagi mengakses pendidikan bermutu?”

dokumen soal CSR dalam **Dari Halaman 1** han yang dilakukan di Kantor Pusat Bank Indonesia, Thamrin, Jakarta Pusat.

“Kedatangan KPK untuk melengkap proses penyidikan terkait dengan penyalahgunaan pemanfaatan CSR. Dalam kedatangan itu, KPK, dalam informasi yang kami terima, membawa dokumen-dokumen terkait dengan CSR tadi,” ungkap Perry.

Perry mengatakan pihaknya akan menghor-mati proses hukum yang dilaksanakan KPK sebagaimana prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pihaknya juga akan mendukung upaya penyidikan dan bersikap kooperatif kepada KPK.

“Kami mendukung upaya penyidikan dan bersikap kooperatif kepada KPK. Dan ini juga sudah kami tunjukkan selama ini baik dari pemberian keterangan dari pejabat kami maupun penyampaian dokumen yang disampaikan,” beber Perry.

2. CSR BI Dilakukan Sesuai Ketentuan

Perry juga menegaskan dana CSR BI diberikan sesuai dengan tata kelola dan ketentuan yang ketat di internal Bank Indonesia. Dia menjelaskan semua program CSR BI diajukan langsung oleh setiap Satuan Kerja khusus di Kantor Pusat maupun Kantor Wilayah.

Selain itu, ada tiga hal yang harus dipenuhi dalam program CSR BI. Perry menyebut, hal yang pertama adalah CSR harus diberikan pada yayasan yang sah dan berbadan hukum. Kedua, program kerja harus konkret dan akan ada

Menkeu Diminta...

Intinya, sektor pendidikan sebisa mungkin jangan dipajakin terlalu tinggi apalagi sampai 12 persen,” ucap dia.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDIP Novita Hardini juga mengkritik rencana pemerintah mengenakan PPN 12 persen untuk sekolah berstandar internasional.

Menurut Novita, kenaikan itu akan menghambat masyarakat mengakses pendidikan berkualitas. Apalagi, selama ini sekolah internasional menjadi tolak ukur meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

“Dengan adanya sekolah internasional, sekolah nasional memiliki tolak ukur dan motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ini penting agar pendidikan di Indonesia bisa lebih kompetitif di tingkat global,” kata Novita dalam keterangannya, Rabu.

Menurut dia, kata dia, ada 198 sekolah berstandar internasional di seluruh Indonesia. Pendaftaran siswa pun menunjukkan tren kenaikan.

Gubernur Bl...

dievaluasi secara khusus.

Ketiga, semua program kerja CSR yang dilakukan harus dilakukan pengecekan setelah dilakukan. Yayasan harus memberikan laporan pertanggungjawaban program yang dijalankan.

“Kami juga sudah pernah sampaikan, CSR BI diberikan sesuai dengan tata kelola dan ketentuan kuat di BI. Antara lain, memenuhi persyaratan bahwa CSR harus diberikan kepada yayasan yang sah. Kedua ada program kerja konkret dan juga pengecekan. Lalu, juga ada laporan pertanggungjawaban oleh yayasan itu,” papar Perry.

Dewan Gubernur, termasuk dirinya, hanya membuat alokasi dana secara garis besar untuk 3 pilar program CSR, yaitu program pendidikan, program pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan program ibadah sosial.

Nah program secara terperinci diajukan oleh Satuan Kerja Khusus, kemudian pihaknya akan memutuskan program mana saja yang dijalankan dalam Rapat Dewan Gubernur tahunan. Kemudian pelaksanaan CSR-nya juga dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus dengan melakukan tiga persyaratan yang sudah dia sebutkan di awal.

“Alokasi besarnya diajukan oleh Satuan Kerja lalu diputuskan di Rapat Dewan Gubernur tahunan, alokasi besarnya. Pelaksanaannya nanti di Satuan Kerja dan prosedurnya tiga tadi, harus yayasan yang sah, programnya jelas, dan ada pertanggungjawaban,” jelas Perry.

3. Isu Korupsi Pengaruhi Rupiah

Zionis Gempur...

sebut Bassal, seorang anak tewas dan beberapa orang lainnya luka-luka. Jabalia menjadi fokus dari operasi militer Israel dalam beberapa bulan terakhir.

Bassal menyebut satu warga Palestina lainnya tewas akibat serangan yang menghantam sebuah tenda pengungsi di zona aman yang ditetapkan oleh Israel sendiri di wilayah Jalur Gaza bagian selatan.

Rentetan serangan Israel ini terjadi ketika sejumlah pihak dalam perundingan gencatan senjata, yang telah terhenti lama, mengatakan kesepakatan mungkin segera dicapai untuk menghentikan pertempuran dan membebaskan para sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan, pada Selasa (17/12), bahwa “optimisme yang hati-hati menjadi cara yang adil untuk menggambarkan situasinya,

Jokowi Cacat...

Selain itu, Jokowi juga dianggap telah melakukan intervensi Mahkamah Konstitusi demi kepentingan keluarga. PDIP juga menganggap Jokowi telah merusak sistem demokrasi Indonesia.

“Menimbang bahwa tindakan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi dan penggunaan instrumen negara demi kepentingan pribadi dan keluarga telah menimbulkan dampak sistemik yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan moral etika berbangsa dan bernegara,” lanjut SK itu.

Atas dasar itulah, PDIP pun memecat Jokowi karena dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin anggota partai. “Teradu terbukti melakukan tindakan pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai dengan mencederai cita-cita dan tujuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” imbuh SK tersebut.

Untuk diketahui, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengeluarkan surat keputusan terkait pemecatan Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution, dan 27 kader lainnya dari partai. Mereka bukan lagi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Keputusan itu dibacakan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun. Pemecatan Jokowi disampaikan berdasarkan Surat Keputusan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024.

“Saya mendapat perintah langsung dari

Novita berpendapat banyak orang tua menyekolahkan anak mereka di sekolah internasional bukan karena berasal dari masyarakat kelas atas, melainkan ingin mendapatkan pendidikan terbaik.

Novita pun menutarakan ada dua dampak dari kebijakan tersebut. Pertama, beban biaya operasional sekolah meningkat. Kedua, sekolah internasional berisiko kehilangan calon siswa.

Layanan sekolah internasional dan rumah sakit mewah bakal dikenakan PPN 12 persen. Saat ini, kedua hal itu bebas dari pungutan pajak.

Kenaikan PPN ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan PPN 12 persen mulai 2025 dikenakan hanya untuk barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat kelas atas.

“Desil paling kaya, desil 9-10 kita akan berlakukn penguanaan PPN-nya,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi pada Senin (16/12). **(cnni/js)**

Di sisi lain, Perry juga mengatakan isu penggeledahan Kantor Pusat BI karena kasus dugaan korupsi pemanfaatan dana CSR dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah. Menurutnya, pasar memang sensitif terhadap semua berita yang ada.

Isu dugaan korupsi di tubuh Bank Indonesia bisa saja mempengaruhi nilai tukar rupiah. Sejuah ini nilai tukar rupiah sendiri memang sedang mengalami pelemahan.

“Ada pertanyaan apakah ini berpengaruh ke kondisi pasar, segala berita itu akan berpengaruh kepada kondisi pasar ya, termasuk nilai tukar ya, Tentu saja demikian ya,” ungkap Perry.

Perry mengatakan pihaknya tetap akan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pihaknya akan memiliki perhatian khusus terhadap semua berita-berita yang berpengaruh kepada pasar.

BI, kata Perry, bisa melakukan intervensi pasar lewat berbagai cara. Mulai dari pembelian Surat Berharga Negara (SBN) hingga melakukan penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

“Tentu saja Bank Indonesia dengan berbagai berita-berita yang berpengaruh kepada pasar, termasuk nilai tukar, Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar seperti yang tadi kami sampaikan melalui intervensi,” sebut Perry.

“Bisa melalui pembelian SBN dari pasar sekunder, termasuk langkah lain termasuk SRBI,” katanya melanjutkan. **(det/js)**

meskipun sangat dipengaruhi oleh realisme”.

Hamas, dalam pernyataannya, menyebut perundingan saat ini berlangsung “serius dan positif”. Sementara Menteri Pertahanan (Menthan) Israel, Israel Katz, menyebut kedua pihak semakin dekat pada kesepakatan dibandingkan sebelumnya.

Perang Gaza berkecamuk setelah Hamas menyerang Israel secara mengejutkan pada Oktober tahun lalu. Otoritas Tel Aviv menyebut sekitar 1.200 orang tewas dan lebih dari 250 orang lainnya disandera dalam serangan tersebut.

Militer Israel melancarkan rentetan serangan tanpa henti terhadap Jalur Gaza untuk membalas Hamas, hingga memicu kehancuran dan menimbulkan banyak korban jiwa. Laporan terbaru otoritas kesehatan Gaza menyebut sedikitnya 45.059 orang, sebagian besar warga sipil, tewas akibat rentetan serangan Tel Aviv. **(det/js)**

Ketua Umum PDIP untuk mengumumkan secara resmi, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Joko Widodo, saudara Gibran Rakabuming Raka, dan saduara Bobby Nasution serta 27 anggota lain yang kena pemecatan,” kata Komarudin, seperti dicatut dari detikcom, Rabu (18/12).

Bantah Intervensi MK

Sebelumnya, pada Juni 2023 yang lalu, Jokowi pernah buka suara terkait tuduhan dirinya melakukan intervensi terhadap MK.

“Banyak orang, putusan... nggak ada, nggak pernah campur aduk seperti itu kita,” kata Jokowi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis (15/6).

Jokowi kala itu mengaku masih menunggu MK membacakan putusan terkait sistem Pemilu 2024. Bagi Jokowi, setiap sistem pemilu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.

“Ya nanti tunggu di MK saja, tunggu dari MK saja. Karena apa setiap partai, setiap orang kalau ditanya itu bisa beda-beda karena memang dua-duanya ada kelebihan, ada kelemahannya. Yang tertutup ada kelebihan ada kelemahan, yang terbuka juga ada kelebihan kelemahan,” kata Jokowi. **(det/rm/js)**

Ratusan Warga...

2024 mendatang. Selain itu, massa aksi juga meminta dibangun jalan layang Medan-Berastagi.

“Segera tuntutaskan bronjong Medan-Berastagi sebelum 25 Desember 2024,” katanya.

Selain itu, warga juga menuntut agar jalan layang Medan-Berastagi segera diwujudkan. Warga juga meminta agar diberikan jaminan rute Medan-Berastagi aman dilintasi.

Setelah cukup lama menunggu, aksi mereka

diterima Kabag Humas DPRD Sumut, Sofyan yang berjanji akan meneruskan aspirasi peserta aksi ke pimpinan dewan. Saat ini, lajut Sofyan, semua anggota dewan mengikuti Bimbingan Teknik (Bimtek) yang digelar di Surabaya, Jawa Timur.

Usai mendengarkan paparan Sofyan, peserta aksi meninggalkan gedung dewan dengan tertib menggunakan bus menuju kampung halaman mereka di 9 kabupaten/kota. **(A-06)**